

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Garner. *Black's Law Dictionary*. Sevent Edlflon. St Paul. Minn: West Group. 1990.
- A.Gunawan Setiardja. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 1990.
- AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori, dan Aplikasi"*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2013.
- Alim HS. Dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.
- Anung Sugihantono. dkk. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Penerbit Kementerian Kesehatan RI. Jakarta. 2020.
- Budi Utomo. *Telaah Kebijakan: Penanggulangan Covid-19 di Indonesia*. Penerbit BNPB dan Universitas Indonesia. Jakarta. 2020.
- Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Penerbit Media Pressindo. Yogyakarta. 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 1989.
- Dyah Mutiara Dan Arif Zaenudin. *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan*. Penerbit Pusataka Belajar. Yogyakarta. 2014.
- Faisal H. Basri. *Otonomi Atau Federalisme*. Cetakan Pertama. Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.2000.
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.
- Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta. 2011.

- Harris Iskandar. dkk. *Pengendalian COVID-19 dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten*. Penerbit Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Jakarta. 2021.
- H.M. Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Indryanto Seno Adji dalam Muchsin. *Fungsi, Tugas dan Wewenang Ombudsman menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008*. Penerbit Varia Peradilan. 2009.
- JCT Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- J.G. Brouwer dan Schilder. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Ars Aequilibrum. Nijmegen. 1998.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta. 2006.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Studi Pembelajaran Penanganan Covid-19 Indonesia*. Penerbit Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). DKI Jakarta. 2021.
- Mabrun SF, dkk. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi*. Penerbit UI Press. Jakarta. 2011.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1998.
- Muchsan. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Penerbit Liberty. Yogyakarta. 1981.
- Muin Fahmal. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak, Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) sebagai Instrumen Pemerintahan yang Bersih (Clean Government)*. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. 2006.
- Philipus. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Penerbit Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta. 2010.
- Philipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang*. Penerbit Universitas Airlangga. Surabaya. 1997.

- Rachma Fitriati.dkk. *Buku Saku Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19*. Penerbit Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Jakarta Selatan. 2020.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Penebit RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Rusadi Kantaprawira. *Hukum dan Kekuasaan*. Penerbit Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 1998.
- Safri Nugraha. *Privatisation of State Enterprises In The 20th Century A Step Forwards or Backwards*. Penerbit Fakultas Hukum UI. Jakarta. 2004.
- Salim dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Sjachran Basah. *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung. 1997.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- S. Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994.
- Suwoto Mulyosudarmo. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Penerbit Universitas Airlangga. Surabaya. 1990.
- Titon Slamet Kurnia. *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*. Penerbit PT. Alumni. Bandung. 2007.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Penerbit Sinar Mulia. Jakarta. 2002.
- William N.Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit Gajah Mada University Pres. Yogyakarta. 2003.

B. Jurnal

- Aji, R. H. S. Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol.1. No.7. 2020.
- Ateng Syafrudin. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia*. Vol.IV. 2000.
- Dian Herdiana, dkk. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*. Vol.12. No.1. 2021.
- Diyar Ginanjar. Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19. Vol 13 No.1. *Jurnal Politik Pemerintah Dharma Praja*. 2020.
- Etri Yanti. Nova Fridalni dan Harmawati. Mencegah Penularan Virus Corona. Vol.2. No.1. *Jurnal Abdimas Sainatika*. 2020.
- Imas Novita Juaningsih. Yosua Consuello. Ahmad Tarmidzi dan Dzakwan NurIrfan, Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Vol.7. No.6. Jakarta. 2020.
- Moch Halim Sukur.dkk. Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. Vol.1. No.1. *Jurnal Inicio Legis*. 2020.
- Muhammad Taufiq Hatta Wibowo. Ami Afriyani. Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 12. No. 1. 2021.
- Muhammad Zein Abdullah. Strategi Komunikasi Politik dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia; Menuju Pemilu yang Berkualitas. *Jurnal Observasi*. Vol.6. No.1. 2008.
- Oman Sukmana. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sospol*. Vol.2. No.1. 2016.
- Sylvia Amanda. dan Dian Puji S. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT di Tangerang selatan. *Indonesian Constitutional Law Journal*. Vol.3. No.1. 2019.

Zahrotunnimah. Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. Vol.7. No.3. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus 2019 (COVID-19).

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Jaringan Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease 19 (COVID-19) Di Jawa Barat.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019.

Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 443/KEP.397-BPBD/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 Daerah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Coronavirus Disease 2019.

Keputusan Bupati Sumedang Nomor 352 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pada Semua Jenjang Pendidikan Di Wilayah Kabupaten Sumedang Semester Gajil Tahun Pelajaran 2021/2022.